



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK



RENCANA KERJA (RENJA)

2022



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Rahadi Osman No.3 Telp.(0561) 733041 Fax (0561) Pontianak 78111
Website: www.diskominfo.pontianakkota.go.id. Email:kominfo@pontianakkota.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kerja satu tahun yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan dan tetap mengacu RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pontianak terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan OPD pelaksana. Renja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2021 berpedoman kepada RPJM Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dan Rentra OPD yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi Walikota Kota Pontianak terpilih yaitu **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat”** dengan Misi ke 3 (tiga) yang harus di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”**.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam berupaya mewujudkan visinya.

Pontianak, 2021
PLT. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Pontianak

H. Yuli Trisna Ibrahim, ST. MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ...	8
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	20
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	26
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	41
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	42
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika	43
	3.3 Program dan Kegiatan	44
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	56
BAB V	PENUTUP	66
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun s/d Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	10
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	22
Tabel 2.3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020-2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	27
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	32
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak	41
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023	48
Tabel 4.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tahun 2022	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bedasarkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Pontianak, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak memiliki tugas dan fungsi dalam urusan Komunikasi dan Informatika, urusan persandian dan urusan statistik sektoral. Urusan tersebut di fokuskan dalam mewujudkan misi yang ketiga Kota Pontianak yaitu meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan prioritas pembangunan yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pencapaiannya program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan komunitas berbasis potensi lokal. Selain itu juga untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan dan akses informasi, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas data sektoral kota Pontianak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu di bidang komunikasi, bidang informatika dan bidang statistik.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Renstra merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun.

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2022 berpedoman kepada RPJM Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 dan Renstra perangkat daerah yang bertujuan untuk mendukung dalam mewujudkan Visi Walikota Kota Pontianak terpilih yaitu **“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan**

Bermartabat” dengan Misi ke 3 (tiga) yang harus di laksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”**, melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan mengevaluasi kinerja tahun 2020 dan 2021.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
 15. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);
 16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 49).
 17. Peraturan Daerah Kota Pontianak No 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 19);

20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 21);
21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak.
22. Peraturan Walikota Pontianak Nomor Tahun 2020 tentang tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai dokumen perencanaan yang berisikan program kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2022. Dengan demikian, Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Perangkat daerah adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT, PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota Pontianak tahun 2022 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-Perangkat Daerah) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang harus mempunyai keselarasan rumusan

substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra- Perangkat Daerah dan Renja, RKT Perangkat Daerah, maka dokumen Renja, RKT Perangkat Daerah haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra- Perangkat Daerah tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan program Perangkat Daerah haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT Perangkat Daerah harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra-Perangkat Daerah dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Renja dalam pengelolaan organisasi Perangkat daerah yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2022.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja yang dibuat untuk rentang waktu selama satu tahun ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 128 yaitu hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat daerah sistematika paling sedikit memuat terdiri dari pendahuluan, evaluasi Renja Perangkat daerah Tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat daerah , rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dan penutup, sistematika renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- BAB I** **PENDAHULUAN**
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen dalam menyusun Renja.
- BAB II** **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**
Memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu – Isu Penting dalam Pelayanan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III** **TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.
- BAB IV** **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH.**
Bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan indikatif Perangkat daerah pada Tahun Anggaran 2022.
- BAB V** **PENUTUP**
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan sub kegiatan, kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak terbentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah yang di tindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Pontianak dan untuk teknis melengkapi kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dituangkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 86 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan kinerja kegiatan dan anggaran. Realisasi kinerja kegiatan dan anggaran merupakan evaluasi dari rencana kerja tahun 2021 dan target tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Untuk mewujudkan dengan program dan kegiatan sebagaimana dapat tergambar pada tabel 2.1.

Berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2020-2024 di atas dapat kita lihat rata-rata semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan perubahan sepanjang terjadi pemutakhiran yaitu penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun s/d Tahun 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2020-2024	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2021)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
2. 16.	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2. 16. 02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	100 persen			90 persen	85 persen	94,44%	89,44 persen	87,22 persen	87,22%
2. 16. 02. 2 01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	15 informasi			498 informasi	498 informasi	100,00%	12 informasi	12 informasi	80,00%
2. 16. 02. 2 01. 02.	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	12 dokumen			0 dokumen	0 dokumen	-	0 dokumen	0 dokumen	0,00%
2. 16. 02. 2 01. 04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	15 konten			12 konten	12 konten	100,00%	12 konten	12 konten	80,00%
2. 16. 02. 2 01. 05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	4 kali			1 kali	1 kali	100,00%	4 kali	4 kali	100,00%

1						2		3		4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
2.	16.	02.	2	01.	06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	556	pengaduan			480	pengaduan	450	pengaduan	93,75%	480	pengaduan	480	pengaduan	86,33%				
2.	16.	02.	2	01.	07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	23	kali			0	kali	0	kali	0,00%	20	kali	20	kali	86,96%				
2.	16.	02.	2	01.	08.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	7	komunitas			1	komunitas	1	komunitas	100,00%	6	komunitas	6	komunitas	85,71%				
2.	16.	02.	2	01.	09.	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	3	dokumen			0	dokumen	0	dokumen	0,00%	2	dokumen	2	dokumen	66,67%				
2.	16.	02.	2	01.	11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	45	informasi			0	informasi	0	informasi	0,00%	40	informasi	40	informasi	88,89%				
2.	16.	03.				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	100	persen			88	persen	88	persen	100,00%	91	persen	91	persen	91,00%				
2.	16.	03.	2	01.		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	175	domain / sub domain			163	domain / sub domain	163	domain / sub domain	100,00%	65	domain / sub domain	65	domain / sub domain	37,14%				
2.	16.	03.	2	01.	02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	175	domain / sub domain			163	domain / sub domain	163	domain / sub domain	100,00%	165	domain / sub domain	165	domain / sub domain	94,29%				
2.	16.	03.	2	01.	03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30	perangkat daerah			2	perangkat daerah	2	perangkat daerah	100,00%	5	perangkat daerah	5	perangkat daerah	16,67%				

1					2		3		4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.	16.	03.	2	02.					2	Aplikasi / Layanan Publik			2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	100,00%	2	Aplikasi / Layanan Publik	2	Aplikasi / Layanan Publik	100,00%
2.	16.	03.	2	02.	02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government	1	kali				1	kali	1	kali	100,00%	1	kali	1	kali	100,00%
2.	16.	03.	2	02.	03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	30	perangkat daerah				30	perangkat daerah	30	perangkat daerah	100,00%	30	perangkat daerah	30	perangkat daerah	100,00%
2.	16.	03.	2	02.	07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	13	aplikasi				2	aplikasi	2	aplikasi	100,00%	6	aplikasi	6	aplikasi	46,15%
2.	16.	03.	2	02.	08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1	aplikasi				0	aplikasi	0	aplikasi	0,00%	1	aplikasi	1	aplikasi	100,00%
2.	16.	03.	2	02.	09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	30	perangkat daerah				0	perangkat daerah	0	perangkat daerah	0,00%	24	perangkat daerah	24	perangkat daerah	80,00%
2.	16.	03.	2	02.	10.	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	5	sistem				0	sistem	0	sistem	0,00%	5	sistem	5	sistem	100,00%
2.	16.	03.	2	02.	12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1	laporan				0	laporan	0	laporan	0,00%	1	laporan	1	laporan	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR														
2.	20.													
		BIDANG URUSAN STATISTIK SEKTORAL												
2.	20.	02.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	98 persen	88 persen	88 persen	100,00%	90 persen	90 persen	91,84%			
2.	20.	02.	2	01.										
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	2000 data	1500 data	1500 data	100,00%	1500 data	1500 data	75,00%	
2.	20.	02.	2	01.	01.									
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	18 Kali	2 Kali	1 Kali	50,00%	4 Kali	4 Kali	22,22%
2.	20.	02.	2	01.	02.									
						Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	8 kali	0 kali	0 kali	-	2 kali	2 kali	25,00%
2.	20.	02.	2	01.	03.									
						Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	400 buku	0 buku	0 buku	-	100 buku	100 buku	25,00%
2.	20.	02.	2	01.	04.									
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	850 buku	250 buku	250 buku	100,00%	250 buku	250 buku	29,41%
2.	20.	02.	2	01.	05.									
						Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0 Unit	0,00%
2.	20.	02.	2	01.	06.									
						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	645 buku	50 buku	50 buku	100,00%	130 buku	130 buku	20,16%
							2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	2000 data	1500 data	1500 data	100,00%	1500 data	1500 data	75,00%
							3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	125 kali	30 kali	30 kali	100,00%	30 kali	30 kali	24,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2.	21.									
2.	21.	02.								
2.	21.	02.	2	01.						
2.	21.	02.	2	01.	01.					
2.	21.	02.	2	01.	02.					
2.	21.	02.	2	01.	03.					
2.	21.	02.	2	01.	04.					

1				2		3		4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
2.	21.	02.	2 02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)		30	Perangkat Daerah			0	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	-	0	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0,00%
2.	21.	02.	2 02. 01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		12	bulan			0	bulan	0	bulan	-	0	bulan	0	bulan	0,00%
2.	16.	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan		100	persen			90	persen	90	persen	100,00%	92	persen	92	persen	92,00%
2.	16.	01.	2 01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah		18	dokumen			12	dokumen	12	dokumen	100,00%	18	dokumen	18	dokumen	100,00%
2.	16.	01.	2 01. 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		7	Dokumen			6	Dokumen	6	Dokumen	100,00%	7	Dokumen	7	Dokumen	100,00%
2.	16.	01.	2 01. 02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun		60	Sub Kegiatan			5	Sub Kegiatan	5	Sub Kegiatan	100,00%	54	Sub Kegiatan	54	Sub Kegiatan	90,00%
2.	16.	01.	2 01. 03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun		20	Sub Kegiatan			20	Sub Kegiatan	20	Sub Kegiatan	100,00%	20	Sub Kegiatan	20	Sub Kegiatan	100,00%
2.	16.	01.	2 01. 04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun		13	Kegiatan			12	Kegiatan	12	Kegiatan	100,00%	12	Kegiatan	12	Kegiatan	92,31%
2.	16.	01.	2 01. 05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun		9	Kegiatan			10	Kegiatan	10	Kegiatan	100,00%	10	Kegiatan	10	Kegiatan	111,11%
2.	16.	01.	2 01. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		5	Laporan			1	Laporan	1	Laporan	100,00%	5	Laporan	5	Laporan	100,00%
2.	16.	01.	2 01. 07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		6	Laporan			6	Laporan	6	Laporan	100,00%	6	Laporan	6	Laporan	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2. 16. 01. 2 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 02. 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 02. 02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 02. 03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 02. 04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 02. 05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan		1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	25,00%
2. 16. 01. 2 02. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100,00%	12 laporan	12 laporan	100,00%
2. 16. 01. 2 05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 05. 02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	83 stel		0 stel	0 stel	-	81 stel	81 stel	97,59%
2. 16. 01. 2 05. 03.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	4 orang		0 orang	0 orang	-	4 orang	4 orang	100,00%
2. 16. 01. 2 05. 04.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 kali		0 kali	0 kali	-	0 kali	0 kali	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2. 16. 01. 2 06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 06. 01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 06. 02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	-	Unit	Unit	-
2. 16. 01. 2 06. 03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	-	Unit	Unit	-
2. 16. 01. 2 06. 04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 06. 05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 06. 06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 06. 07.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan		0 bulan	0 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	167 unit		38 unit	38 unit	100,00%	68 unit	68 unit	40,72%
2. 16. 01. 2 07. 04.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit		0 unit	0 unit	-	0 unit	0 unit	-
2. 16. 01. 2 07. 05.	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	64 unit		1 unit	1 unit	100,00%	30 unit	30 unit	46,88%
2. 16. 01. 2 07. 06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	77 unit		37 unit	37 unit	100,00%	37 unit	37 unit	48,05%

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2. 16. 01. 2 07. 07.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	5 unit		0 unit	0 unit	-	1 unit	1 unit	20,00%
2. 16. 01. 2 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 08. 01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 08. 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 08. 03.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan		12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	12 bulan	100,00%
2. 16. 01. 2 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	304 Unit		28 Unit	28 Unit	100,00%	12 Unit	12 Unit	3,95%
2. 16. 01. 2 09. 02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2 unit		2 unit	2 unit	100,00%	2 unit	2 unit	100,00%
2. 16. 01. 2 09. 03.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	289 unit		25 unit	25 unit	100,00%	59 unit	59 unit	20,42%
2. 16. 01. 2 09. 04.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit		1 unit	1 unit	100,00%	1 unit	1 unit	100,00%

Pada tabel diatas dapat dilihat Target Capaian Program Renstra Tahun 2020-2024, dimana Tingkat Realisasi Capaian Program dan Kegiatan dilaksanakan pada Tahun ke-1 yakni Tahun 2020 dapat dikategorikan sangat berhasil, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang disebabkan adanya efesiensi anggaran untuk pengalihan dana untuk covid 19.

Pada program Informasi dan Komunikasi Publik, terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja, dimana capaian kinerja hanya sebesar 93,75%. Sub kegiatan tersebut adalah Pelayanan Informasi Publik. Hal ini terkait dengan jumlah pengaduan yang terverifikasi. Tidak tercapainya target sub kegiatan ini lebih dikarenakan jumlah pengaduan yang diterima tidak sebesar yang ditargetkan. Ini artinya pengaduan masyarakat atas pelayanan pemerintahan menurun, walaupun secara target jumlahnya kurang dari yang telah ditargetkan.

Sedangkan untuk program Aplikasi Informatika, program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi secara keseluruhan mencapai target yang telah ditentukan setelah perubahan anggaran, sehingga target disesuaikan dengan penganggaran yang telah ditentukan.

Memang pada Untuk Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2020-2024 ada beberapa sub kegiatan memiliki persentase tinggi hal ini dikarenakan target pada sub kegiatan tidak bisa diakumulasikan pertahun melainkan menggunakan hitungan rata-rata.

Adapun peningkatan jumlah anggaran pertahun bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat daerah , meningkatkan kualitas aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis e-government, meningkatkan kualitas informasi pembangunan dan meningkatnya kuantitas dan kualitas data sektoral Kota Pontianak.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sesuai RPJMD Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 pada misi ke 3 (ketiga) urusan bidang komunikasi dan informasi dengan tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak mengampu untuk 3 bidang urusan, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistic sektoral dan urusan persandian.

Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan standar pelayanan minimal dan indicator penyelenggaraan pemerintah daerah. Setiap kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kominfo di Kabupaten atau Kota, jenis pelayanan dasar SPM dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Untuk pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang telah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal maupun indicator penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana PERMENDAGRI 18 Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 2.2.

Adapun pencapaian SPM pada Tahun 2020 dalam bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional yang dilaksanakan melalui :
 - Media website/media online resmi Pemerintah Kota Pontianak (www.pontianakkota.go.id) dilakukan setiap hari
 - Media luar ruang yakni seperti :

- a) Spanduk = 6 kali
- b) Media elektronik = 4 kali
- c) Leaflet = 1 jenis
- d) Booklet = 2 jenis
- e) Baliho = 25 jenis

2. Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

Kegiatan ini dilakukan di 6 kecamatan di Kota Pontianak dengan melakukan survey pendataan dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat di masing-masing 6 kecamatan.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I Urusan Komunikasi dan Informatika												
1.	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah		IKK Output I.1	2 OPD	5 OPD	5 OPD	10 OPD	2 OPD	5 OPD	5 OPD	10 OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
2.	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah		IKK Output I.3	0 Sistem	5 Sistem	5 Sistem	5 Sistem	0 Sistem	5 Sistem	5 Sistem	5 Sistem	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
3.	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah		IKK Output II.2	163 domain / sub domain	65 domain / sub domain	29 domain / sub domain	29 Domain / sub domain	163 domain / sub domain	65 domain / sub domain	29 domain / sub domain	29 domain / sub domain	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
4.	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan		IKK Output II.6	2 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	2 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
5.	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi		IKK Output II.7	2 Aplikasi / Layanan Publik	2 Aplikasi / Layanan Publik	2 Aplikasi / Layanan Publik	2 Aplikasi / Layanan Publik	2 Aplikasi / Layanan Publik	2 Aplikasi / Layanan Publik	2 Aplikasi / Layanan Publik	2 Aplikasi / Layanan Publik	2 Aplikasi / Layanan Publik	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
6.	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		IKK Output II.8 dan IKK Output II.9	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	30 OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
7.	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City		IKK Output II.12	0 OPD	24 OPD	25 OPD	27 OPD	0 OPD	24 OPD	25 OPD	27 OPD	27 OPD	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
8.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		IKK Outcome III.1	90 Persen	89,44 persen	93 Persen	96 persen	85 persen	89,44 persen	93 persen	96 persen	96 persen	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
9.	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah		IKK Output III.1	1 komunitas	6 komunitas	6 komunitas	6 komunitas	1 komunitas	6 komunitas	6 komunitas	6 komunitas	6 komunitas	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi		IKK Output III.2	12 Konten	12 Konten	13 Konten	14 Konten	12 Konten	12 Konten	13 Konten	14 Konten	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
11.	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi		IKK Output III.3	1 kali	4 kali	4 kali	4 kali	1 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
II. Urusan Statistik Sektoral												
1.	Jumlah Buku Profil Daerah		IKK Output I.1									
2.	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data		IKK Output I.6	0 buku	100 buku	100 buku	100 buku	0 buku	100 buku	100 buku	100 buku	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
III. Urusan Persandian												
1.	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah		IKK Outcome I.	Cukup Baik Indeks	Cukup Baik Indeks	Baik Indeks	Baik Indeks	kurang Baik Indeks	Cukup Baik Indeks	Baik Indeks	Baik Indeks	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
2.	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS		IKK Output I.1	0 sistem / kegiatan	6 sistem / kegiatan	6 sistem / kegiatan	6 sistem / kegiatan	0 sistem / kegiatan	6 sistem / kegiatan	6 sistem / kegiatan	6 sistem / kegiatan	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
3.	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah		IKK Output I.2	4 Sertifikat elektronik	7 Sertifikat elektronik	7 Sertifikat elektronik	7 Sertifikat elektronik	4 Sertifikat elektronik	7 Sertifikat elektronik	7 Sertifikat elektronik	7 Sertifikat elektronik	7 Sertifikat elektronik	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020
4.	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah		IKK Output I.3	6 sistem / kegiatan	6 sistem / kegiatan	8 sistem / kegiatan	8 sistem / kegiatan	6 sistem / kegiatan	6 sistem / kegiatan	8 sistem / kegiatan	8 sistem / kegiatan	8 sistem / kegiatan	Terkait dan sesuai dengan IKK menurut PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2020

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, dalam berbagai bidang. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan sebagian besar para futuristik mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif.

Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan good governance.

Pelaksanaan kinerja pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam Renstra Diskominfo tahun 2020 – 2024 dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana tabel 2.3.

Tabel. 2.3

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020-2024
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	3,5	3,7	4	4,5
2	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : Data Olahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, demi mencapai sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak terlepas dari berbagai isu strategis / isu penting yang menjadi hal-hal yang harus diperhatikan. Hal ini disebabkan dampaknya yang signifikan di masa depan. Isu strategis atau isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu penting atau isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dengan memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika, persandian dan statistic sectoral. Sehingga dapat ditetapkan isu penting pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pembangunan Jaringan dan Aplikasi yang Terintegrasi;

2. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
3. Belum optimalnya pengawasan dari masyarakat dalam rangka penyiaran informasi yang berkualitas; Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
4. Belum adanya updating data statistik sektoral maupun statistik;
5. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah.

Terdapat berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan dan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak. Dalam upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dari perangkat daerah. Adapun factor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Strength / Kekuatan
 - a) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
 - b) Telah tersedianya masterplan SPBE dan masterplan Smart City
 - c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
 - d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
 - e) Adanya sarana dan prasarana
- 2) Weakness / Kelemahan
 - a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
 - b) Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar OPD dalam Pelaksanaan e-government

- c) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah
 - d) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
 - e) Data pelaksanaan kegiatan yang ada kurang lengkap
 - f) Distribusi penggunaan sistem aplikasi dalam menerapkan e-Government di perangkat daerah yang lain yang belum merata
 - g) Pengelolaan website di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak masih kurang aktif dan efektif
 - h) Kurangnya jaminan keamanan sistem informasi
 - i) Adanya kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat
- 3) Opportunities / Peluang
- a) Terdapat Lembaga atau institusi pendidikan di Kota Pontianak yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika
 - b) Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
 - c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat
 - d) Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat
 - e) Penyelenggaraan statistik sektoral
 - f) Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah
 - g) Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi
- 4) Threats / Ancaman
- a) Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi
 - b) Kebebasan penggunaan media sosial.
 - c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Pontianak smart city
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
- e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horisontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

Dari hasil inventaris isu-isu penting dan strategis yang ada dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, yang menjadi isu penting dan catatan untuk ditindaklanjuti dalam penentuan program dan kegiatan prioritas adalah terkait :

- 1) Masih kurangnya pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar OPD dalam Pelaksanaan e-government, Hal ini terkait dengan pembangunan jaringan intra pemerintah daerah yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar, tetapi merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan pemerintah daerah.
- 2) Kurangnya jaminan keamanan sistem informasi dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah.
- 3) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Terutama terkait dengan kewenangan dan fungsi humas pemerintah daerah yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Pontianak yang membutuhkan alokasi anggaran cukup besar dan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi aspirasi publik dan media sosial.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2022 tidak terlepas dari perkembangan anggaran tahun 2020 dan 2021, rancangan awal RKPD Diskominfo Kota Pontianak tahun 2020 dengan pagu awal Musrenbang total sebesar Rp.12.138.553.000,- dengan jumlah 75 sub kegiatan dan terjadi perubahan dalam Forum SKPD anggaran berkurang menjadi sebesar Rp.11.838.553.000,- dengan jumlah sebanyak 72 kegiatan, selanjutnya dalam hasil pembahasan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo dengan Tim RKPD Kota Pontianak jumlah anggaran berubah menjadi sebesar Rp.9.020.255.729.000,- dengan jumlah 63 kegiatan.

Sedangkan untuk anggaran hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.6.362.270.408,- dari anggaran tersebut dijabarkan kedalam 50 kegiatan, terjadinya penurunan anggaran maupun kegiatan disebabkan karena terjadinya pemotongan anggaran dalam rangka refocusing akibat mewabahnya Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan prioritas Perangkat daerah . Pembatalan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau yang bukan prioritas seperti perjalanan dinas merupakan kegiatan yang tidak dapat dilakukan pada kategori kegiatan bukan darurat.

Sedangkan untuk Tahun 2021 nilai yang masuk didalam RKPD sebesar Rp.7.152.399.900,- dengan jumlah 5 program, kegiatan berjumlah 13 kegiatan dan 54 Sub kegiatan. Untuk tahun 2022, pada RKPD anggaran dialokasikan sebesar Rp. 6.079.279.757,- dengan jumlah program sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 58 sub kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagaimana tabel 2.4.

Tabel. 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.212.371.497,00	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				4.212.371.497,00	
1.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Pontianak	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	93 persen	972.931.478,00	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kota Pontianak	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	93 persen	972.931.478,00	
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	13 informasi	972.931.478,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	13 informasi	972.931.478,00	
1.1.1	Monitoring opini dan aspirasi publik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	12 dokumen	10.000.000,00	Monitoring opini dan aspirasi publik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	12 dokumen	10.000.000,00	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat
1.1.2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	13 konten	423.283.292,00	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	13 konten	423.283.292,00	
1.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	4 kali	98.436.403,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	4 kali	98.436.403,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.4	Pelayanan Informasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	504 pengaduan	109.622.256,00	Pelayanan Informasi Publik	Kota Pontianak	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	504 pengaduan	109.622.256,00	
1.1.5	Layanan Hubungan Media	Kota Pontianak	Jumlah siaran pers yang dilakukan	21 kali	106.681.085,00	Layanan Hubungan Media	Kota Pontianak	Jumlah siaran pers yang dilakukan	21 kali	106.681.085,00	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena peran HUMAS melekat pada kegiatan ini dan membutuhkan biaya untuk kerjasama dengan media
1.1.6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	6 komunitas	120.507.019,00	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kota Pontianak	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	6 komunitas	120.507.019,00	
1.1.7	Manajemen Komunikasi Krisis	Kota Pontianak	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	3 dokumen	28.281.199,00	Manajemen Komunikasi Krisis	Kota Pontianak	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	3 dokumen	28.281.199,00	
1.1.8	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	45 informasi	76.120.224,00	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kota Pontianak	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	45 informasi	76.120.224,00	
2.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Pontianak	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	94 persen	3.239.440.019,00	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kota Pontianak	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	94 persen	3.239.440.019,00	
2.1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	29 domain / sub domain	1.001.547.269,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	29 domain / sub domain	1.001.547.269,00	
2.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	29 domain / sub domain	116.578.791,00	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	29 domain / sub domain	116.578.791,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 perangkat daerah	884.968.478,00	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 perangkat daerah	884.968.478,00	Masih membutuhkan alokasi dana yang besar karena jaringan intra pemerintah belum sepenuhnya tersedia
2.2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	2 Aplikasi / Layanan Publik	2.237.892.750,00	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	2 Aplikasi / Layanan Publik	2.237.892.750,00	
2.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government	0 kali	-	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government	0 kali	-	
2.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	30 perangkat daerah	1.510.144.925,00	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	30 perangkat daerah	1.510.144.925,00	
2.2.3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	3 aplikasi	190.000.000,00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	3 aplikasi	190.000.000,00	
2.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi / Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 aplikasi	66.086.208,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	Jumlah Aplikasi / Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 aplikasi	66.086.208,00	
2.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	25 perangkat daerah	381.301.617,00	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kota Pontianak	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	25 perangkat daerah	381.301.617,00	
2.2.6	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	5 sistem	5.000.000,00	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	5 sistem	5.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Pontianak	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1 laporan	85.360.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kota Pontianak	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	1 laporan	85.360.000,00	
II	BIDANG URUSAN STATISTIK SEKTORAL				759.708.964,00	BIDANG URUSAN STATISTIK SEKTORAL				759.708.964,00	
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	92 persen	759.708.964,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kota Pontianak	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	92 persen	759.708.964,00	
3.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	1650 data	759.708.964,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	1650 data	759.708.964,00	
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	4 Kali	130.772.845,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	4 Kali	130.772.845,00	
3.1.2	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	2 kali	30.808.936,00	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	2 kali	30.808.936,00	
3.1.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	100 buku	41.850.000,00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	100 buku	41.850.000,00	
3.1.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	250 buku	71.690.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kota Pontianak	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	250 buku	71.690.000,00	
3.1.5	Pengembangan Infrastruktur	Kota Pontianak	Jumlah Infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan	0 Unit		Pengembangan Infrastruktur	Kota Pontianak	Jumlah Infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan	0 Unit		
3.1.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Pontianak	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	140 buku	484.587.183,00	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kota Pontianak	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	140 buku	484.587.183,00	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena kegiatan survey harus dilakukan untuk pemenuhan indikator LPPD
			2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	1650 data				2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;	1650 data		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	30 kali				3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	30 kali		
III	BIDANG URUSAN PERSANDIAN					BIDANG URUSAN PERSANDIAN					
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Pontianak	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	Baik Indeks	244.843.098,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kota Pontianak	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	Baik Indeks	244.843.098,00	
4.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1 area	237.843.098,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	1 area	237.843.098,00	
4.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1 dokumen	23.992.128,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	1 dokumen	23.992.128,00	
4.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	8 sistem	64.310.400,00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	8 sistem	64.310.400,00	
4.1.3	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Pontianak	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	6 sistem / kegiatan	90.116.570,00	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Pontianak	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	6 sistem / kegiatan	90.116.570,00	Membutuhkan al;okasi dana tambahan karena kurang tersedianya perangkat yang mendukung pelaksanaan kegiatan
4.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	7 Sertifikat elektronik	59.424.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Pontianak	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	7 Sertifikat elektronik	59.424.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	5 Perangkat Daerah	7.000.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	5 Perangkat Daerah	7.000.000,00	
4.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	7.000.000,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	7.000.000,00	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pontianak	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	94 persen	5.349.546.241,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pontianak	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	94 persen		
5.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 dokumen	31.257.091,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 dokumen	31.257.091,00	
5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	8.099.010,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7 Dokumen	8.099.010,00	
5.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	60 Sub Kegiatan	2.800.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	60 Sub Kegiatan	2.800.000,00	
5.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	20 Sub Kegiatan	4.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	20 Sub Kegiatan	4.300.000,00	
5.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	13 Kegiatan	2.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	13 Kegiatan	2.300.000,00	
5.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	9 Kegiatan	2.300.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	9 Kegiatan	2.300.000,00	
5.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	5.928.230,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Laporan	5.928.230,00	
5.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan	5.529.851,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Laporan	5.529.851,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	4.479.723.518,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	4.479.723.518,00	
5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.130.200.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	4.130.200.000,00	
5.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	18.736.650,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	18.736.650,00	
5.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	316.620.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	316.620.000,00	
5.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 bulan	3.180.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 bulan	3.180.000,00	
5.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	1.098.967,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 laporan	1.098.967,00	
5.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	9.887.901,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 laporan	9.887.901,00	
5.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83 bulan	80.680.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	83 bulan	80.680.000,00	
5.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	4 stel	50.680.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	4 stel	50.680.000,00	
5.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3 orang	20.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	3 orang	20.000.000,00	
5.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	12 kali	10.000.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	12 kali	10.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	210.792.882,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	210.792.882,00	
5.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	10.137.061,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	10.137.061,00	
5.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	1.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	1.000.000,00	
5.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Unit	1.250.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Unit	1.250.000,00	
5.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	128.205.821,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	128.205.821,00	
5.4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	35.000.000,00	
5.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	10.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	10.200.000,00	
5.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	25.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 bulan	25.000.000,00	
5.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75 unit	141.914.750,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75 unit	141.914.750,00	
5.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 unit	-	
5.5.2	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan mebel	10 unit	20.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan mebel	10 unit	20.000.000,00	
5.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	10 unit	100.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	10 unit	100.000.000,00	
5.5.4	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	1 unit	21.914.750,00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Pontianak	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	1 unit	21.914.750,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	308.396.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 bulan	308.396.000,00	
5.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	10.000.000,00	
5.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	36.207.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 bulan	36.207.600,00	
5.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	262.188.400,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	262.188.400,00	
5.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	69 Unit	96.782.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	69 Unit	96.782.000,00	
5.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2 unit	39.532.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2 unit	39.532.000,00	
5.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	66 unit	52.250.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	66 unit	52.250.000,00	
5.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	5.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang Kota Pontianak Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika, tidak ada usulan dari masyarakat yang berkaitan di bidang Komunikasi dan Informatika yang diperuntukan secara khusus kepada untuk masyarakat yang mana kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi bersifat sebagai PERANGKAT DAERAH pendukung. Dengan demikian, tidak ada usulan masyarakat yang diusung kembali dalam Perubahan RENJA Tahun 2022.

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Pontianak

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025, visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak adalah **“Pontianak Kota Khatulistiwa Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas, Berahlak Mulia, Berbudaya dan Beradab;
2. Mewujudkan Masyarakat Madani, Manusiawi, Berkurangnya Masalah Sosial, Makin Berdaya dan Terjamin Hak-Hak Warga;
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penanaman Modal untuk Kesejahteraan dan Keadilan;
4. Mewujudkan Kota Perdagangan, Jasa, Koperasi dan UKM untuk Menyerap Tenaga Kerja dan Meningkatkan Kemakmuran;
5. Mewujudkan Sarana, Prasarana, Tata Ruang dan Wilayah Perkotaan untuk Perdagangan dan Jasa yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Masyarakat yang Paham Politik dan Taat Hukum.

Visi dan misi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. RPJM Kota Pontianak Tahun 2020-2024 sendiri merupakan periode keempat pembangunan jangka menengah dalam kerangka pembangunan jangka panjang Kota Pontianak.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pontianak untuk periode keempat tahun 2020 – 2024 yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah dalam bidang urusan pembangunan informasi dan komunikasi dengan meningkatkan

pengembangan dan pengelolaan tata pemerintahan berbasis E-Government dan meningkatkan penguasaan serta pengembangan aplikasi dan TIK, dalam urusan bidang pembangunan persandian dengan meningkatkan penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah dan untuk urusan bidang statistic sectoral yaitu meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik serta meningkatkan kualitas data statistik sektoral Kota Pontianak.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tidak di pisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan bidang informasi dan komunikasi, sebelum ditetapkan sebagai salah satu organisasi Perangkat daerah kinerja urusan bidang komunikasi dan informasi yang merupakan bagian dari misi Kota Pontianak Tahun 2020 – 2024 yaitu pada Misi ke 3 (tiga) **“Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas”**.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam mengsinergikan misi RPJMD Kota Pontianak yang pada Misi ke 3 (tiga) **“Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh aparatur yang berintegritas dan sejahtera dengan dukungan teknologi informasi”**, Tujuan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu meningkatkan transparansi informasi penyelenggaraan pemerintahan.

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak**

TUJUAN	SASARAN	IKU KOTA	TARGET IKU	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	PROGRAM PENDUKUNG	PENANGGUNG JAWAB
Visi :	“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG CERDAS DAN BERMARTABAT”.						
Misi 3 :	Meningkatkan kualitas pelayanan yang kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks RB	71,74	Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Program Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Telematika
	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	IKM Kota	Baik	Transparansi Informasi Publik	Indeks Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Bidang Statistik Sektoral

Sumber : Data Olahan

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2022, merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk

kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Dalam rencana kerja program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2022 dapat di kelompokkan menjadi dua sasaran program dan kegiatan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam table Logical Frame work. Untuk Tahun 2020, terdapat 4 program urusan wajib non pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dan 1 program penunjang urusan pemerintah daerah. Seluruh program tersebut diuraikan menjadi 13 kegiatan dan 58 sub kegiatan sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD. Hanya saja untuk pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seluruh program kegiatan dan sub kegiatan melebihi dari RKPD yang disusun sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena dalam pendanaan RKPD tidak mempertimbangkan kondisi Perangkat daerah berdasarkan kebutuhan. Terdapat beberapa sub kegiatan yang memerlukan tambahan anggaran, yaitu:

1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dimana merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempunyai jaringan intra pemerintah daerah yang menghubungkan seluruh Perangkat daerah yang ada. Kondisi Pemerintah Kota Pontianak belum memiliki jaringan intra

pemerintah daerah, dan baru mulai dilaksanakan di tahun 2021 sehingga belum mencakup seluruh Perangkat daerah .

2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah, dimana terdapat pendanaan untuk akses internet di lingkungan pemerintah Kota Pontianak dan juga beberapa area publik. Permintaan dari masyarakat terkait penyediaan akses internet di area publik belum dapat sepenuhnya diberikan.
3. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang mana belum pernah dilakukan sejak tahun 2020, sedangkan sub kegiatan ini dibutuhkan untuk operasional pengamanan informasi daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.
4. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, merupakan sub kegiatan yang dibutuhkan karena berpindahnya fungsi kehumasan pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Akan tetapi tidak dapat dilaksanakan ditahun sebelumnya akibat keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memantau dan mengakomodir aspirasi public baik melalui media social maupun media konvensional lainnya. Dan merupakan salah satu tugas utama dari Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola informasi dan komunikasi pemerintah daerah.
5. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, terkait penyediaan konten informasi pemerintah yang semakin beragam dan membutuhkan jenis media yang berbeda sehingga alokasi anggaran membutuhkan penambahan.
6. Layanan Hubungan Media, terkait kerjasama dengan media yang ada untuk penyampaian informasi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat sehingga dapat memperluas jangkauan masyarakat yang menerima informasi.
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terkait dengan diperlukannya penambahan server dan UPS Server seiring dengan

pertambahan maupun pemutakhiran aplikasi yang dikembangkan Pemerintah Kota Pontianak.

Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 3.1 terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022.

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak
Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2. 16.	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2. 16. 02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Kota Pontianak	93 persen	972.931.478,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 persen	1.184.040.140,00
2. 16. 02. 2. 01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	Kota Pontianak	13 informasi	972.931.478,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 informasi	1.184.040.140,00
2. 16. 02. 2. 01. 02.	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	Kota Pontianak	12 dokumen	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat	12 dokumen	197.652.000,00
2. 16. 02. 2. 01. 04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	Kota Pontianak	13 konten	423.283.292,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 konten	358.699.640,00
2. 16. 02. 2. 01. 05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	Kota Pontianak	4 kali	98.436.403,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 kali	130.500.000,00
2. 16. 02. 2. 01. 06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	Kota Pontianak	504 pengaduan	109.622.256,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		556 pengaduan	126.327.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 02. 2. 01. 07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	Kota Pontianak	21 kali	106.681.085,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena peran HUMAS melekat pada kegiatan ini dan membutuhkan biaya untuk kerjasama dengan media	23 kali	135.300.500,00
2. 16. 02. 2. 01. 08.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	Kota Pontianak	6 komunitas	120.507.019,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 komunitas	107.036.000,00
2. 16. 02. 2. 01. 09.	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	Kota Pontianak	3 dokumen	28.281.199,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 dokumen	43.680.000,00
2. 16. 02. 2. 01. 11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	Kota Pontianak	45 informasi	76.120.224,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45 informasi	84.845.000,00
2. 16. 03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	Kota Pontianak	94 persen	3.239.440.019,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 persen	2.517.395.700,00
2. 16. 03. 2. 01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Kota Pontianak	29 domain / sub domain	1.001.547.269,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175 domain / sub domain	313.858.000,00
2. 16. 03. 2. 01. 02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	Kota Pontianak	29 domain / sub domain	116.578.791,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175 domain / sub domain	133.482.000,00
2. 16. 03. 2. 01. 03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	5 perangkat daerah	884.968.478,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Masih membutuhkan alokasi dana yang besar karena jaringan intra pemerintah belum sepenuhnya tersedia	30 perangkat daerah	180.376.000,00
2. 16. 03. 2. 02.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	Kota Pontianak	2 Aplikasi / Layanan Publik	2.237.892.750,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Aplikasi / Layanan Publik	2.203.537.700,00
2. 16. 03. 2. 02. 02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government	Kota Pontianak	0 kali	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 kali	61.870.526,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 03. 2. 02. 03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Kota Pontianak	30 perangkat daerah	1.510.144.925,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 perangkat daerah	1.347.058.674,00
2. 16. 03. 2. 02. 07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	Kota Pontianak	3 aplikasi	190.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 aplikasi	203.612.000,00
2. 16. 03. 2. 02. 08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	1 aplikasi	66.086.208,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 aplikasi	70.909.000,00
2. 16. 03. 2. 02. 09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	Kota Pontianak	25 perangkat daerah	381.301.617,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 perangkat daerah	420.437.000,00
2. 16. 03. 2. 02. 10.	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	Kota Pontianak	5 sistem	5.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 sistem	11.445.000,00
2. 16. 03. 2. 02. 12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	Kota Pontianak	1 laporan	85.360.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 laporan	88.205.500,00
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2. 20.	BIDANG URUSAN STATISTIK SEKTORAL								
2. 20. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	Kota Pontianak	92 persen	759.708.964,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98 persen	571.717.200,00
2. 20. 02. 2. 01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	Kota Pontianak	1650 data	759.708.964,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2000 data	571.717.200,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 20. 02. 2. 01. 01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	Kota Pontianak	4 Kali	130.772.845,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 Kali	120.902.800,00
2. 20. 02. 2. 01. 02.	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	Kota Pontianak	2 kali	30.808.936,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 kali	49.813.000,00
2. 20. 02. 2. 01. 03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	Kota Pontianak	100 buku	41.850.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400 buku	44.501.400,00
2. 20. 02. 2. 01. 04.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	Kota Pontianak	250 buku	71.690.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		850 buku	46.300.000,00
2. 20. 02. 2. 01. 05.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan	Kota Pontianak	0 Unit		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 Unit	-
2. 20. 02. 2. 01. 06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah; 2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak; 3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral	Kota Pontianak	140 buku 1650 data 30 kali	484.587.183,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena kegiatan survey harus dilakukan untuk pemenuhan indikator LPPD	645 buku 2000 data 125 kali	310.200.000,00
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2. 21.	BIDANG URUSAN PERSANDIAN								
2. 21. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	Kota Pontianak	Baik Indeks	244.843.098,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Sangat Baik Indeks	229.466.000,00
2. 21. 02. 2. 01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	Kota Pontianak	1 area	237.843.098,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 area	218.566.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 21. 02. 2. 01. 01.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	Kota Pontianak	1 dokumen	23.992.128,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	28.604.000,00
2. 21. 02. 2. 01. 02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	Kota Pontianak	8 sistem	64.310.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32 sistem	76.670.000,00
2. 21. 02. 2. 01. 03.	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	Kota Pontianak	6 sistem / kegiatan	90.116.570,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena kurang tersedianya perangkat yang mendukung pelaksanaan kegiatan	24 sistem / kegiatan	100.757.000,00
2. 21. 02. 2. 01. 04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	Kota Pontianak	7 Sertifikat elektronik	59.424.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28 Sertifikat elektronik	12.535.000,00
2. 21. 02. 2. 02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	Kota Pontianak	5 Perangkat Daerah	7.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Perangkat Daerah	10.900.000,00
2. 21. 02. 2. 02. 01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	12 bulan	7.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	10.900.000,00
2. 16. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak	94 persen	5.349.546.241,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 persen	7.178.272.361,00
2. 16. 01. 2. 01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak	22 dokumen	31.257.091,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 dokumen	27.659.074,00
2. 16. 01. 2. 01. 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Pontianak	7 Dokumen	8.099.010,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Dokumen	3.687.600,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 01. 2. 01. 02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	Kota Pontianak	60 Sub Kegiatan	2.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Sub Kegiatan	3.687.600,00
2. 16. 01. 2. 01. 03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Kota Pontianak	20 Sub Kegiatan	4.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Sub Kegiatan	3.687.600,00
2. 16. 01. 2. 01. 04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	Kota Pontianak	13 Kegiatan	2.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 Kegiatan	3.687.600,00
2. 16. 01. 2. 01. 05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kota Pontianak	9 Kegiatan	2.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9 Kegiatan	3.687.600,00
2. 16. 01. 2. 01. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Kota Pontianak	5 Laporan	5.928.230,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Laporan	4.037.074,00
2. 16. 01. 2. 01. 07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak	6 Laporan	5.529.851,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Laporan	5.184.000,00
2. 16. 01. 2. 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak	12 bulan	4.479.723.518,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	5.900.667.033,00
2. 16. 01. 2. 02. 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Pontianak	12 bulan	4.130.200.000,00	Dana Transfer (DAU)		12 bulan	5.634.471.865,00
2. 16. 01. 2. 02. 02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Pontianak	12 bulan	18.736.650,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	19.303.400,00
2. 16. 01. 2. 02. 03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Pontianak	12 bulan	316.620.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	229.702.000,00
2. 16. 01. 2. 02. 04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	1 bulan	3.180.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	2.335.000,00
2. 16. 01. 2. 02. 05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	12 laporan	1.098.967,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 laporan	3.546.768,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 01. 2. 02. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Pontianak	12 laporan	9.887.901,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	11.308.000,00
2. 16. 01. 2. 05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	83 bulan	80.680.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	128.853.260,00
2. 16. 01. 2. 05. 02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Pontianak	4 stel	50.680.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83 stel	78.713.260,00
2. 16. 01. 2. 05. 03.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	Kota Pontianak	3 orang	20.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 orang	33.790.000,00
2. 16. 01. 2. 05. 04.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Pontianak	12 kali	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 kali	16.350.000,00
2. 16. 01. 2. 06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak	12 bulan	210.792.882,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	328.197.190,00
2. 16. 01. 2. 06. 01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	12 bulan	10.137.061,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	11.510.000,00
2. 16. 01. 2. 06. 02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pontianak	1 Unit	1.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 Unit	1.250.000,00
2. 16. 01. 2. 06. 03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Pontianak	1 Unit	1.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 Unit	1.500.000,00
2. 16. 01. 2. 06. 04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Kota Pontianak	12 bulan	128.205.821,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	197.819.272,00
2. 16. 01. 2. 06. 05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kota Pontianak	12 bulan	35.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	61.040.000,00
2. 16. 01. 2. 06. 06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pontianak	12 bulan	10.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	11.673.900,00
2. 16. 01. 2. 06. 07.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kota Pontianak	12 bulan	25.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	43.404.018,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 01. 2. 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	75 unit	141.914.750,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		167 unit	205.660.000,00
2. 16. 01. 2. 07. 04.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Pontianak	0 unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	-
2. 16. 01. 2. 07. 05.	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	Kota Pontianak	10 unit	20.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64 unit	80.660.000,00
2. 16. 01. 2. 07. 06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Pontianak	10 unit	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77 unit	50.000.000,00
2. 16. 01. 2. 07. 07.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	Kota Pontianak	1 unit	21.914.750,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 unit	75.000.000,00
2. 16. 01. 2. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	12 bulan	308.396.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	348.802.122,00
2. 16. 01. 2. 08. 01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pontianak	12 bulan	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	14.306.250,00
2. 16. 01. 2. 08. 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Kota Pontianak	12 bulan	36.207.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	64.329.598,00
2. 16. 01. 2. 08. 03.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Pontianak	12 bulan	262.188.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	270.166.274,00
2. 16. 01. 2. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak	69 Unit	96.782.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		304 Unit	238.433.682,00
2. 16. 01. 2. 09. 02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Kota Pontianak	2 unit	39.532.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 unit	45.244.374,00
2. 16. 01. 2. 09. 03.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Pontianak	66 unit	52.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		289 unit	52.000.000,00
2. 16. 01. 2. 09. 04.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Pontianak	1 unit	5.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	141.189.308,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan untuk anggaran dan capaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun anggaran 2022 yang merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Kota Pontianak tahun 2020-2024, rencana kerja ini upaya dalam pencapaian sasaran kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang urusan Komunikasi dan informatika, bidang urusan persandian dan bidang urusan statistik.

Target anggaran Rencana Kerja Tahun 2022 menggunakan pagu dari renstra sebesar Rp. 6.173.289.615,- sedangkan kebutuhan yang diperlukan sebesar Rp. 8.487.537.823,- sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp. 2.314.248.208,- dan diharapkan dari anggaran tersebut diutamakan sub kegiatan yang prioritas. Untuk itu perlu diambil Langkah-langkah dalam menentukan sub kegiatan prioritas, antara lain :

1. Dalam menentukan sub kegiatan dan penyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan.
2. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan. hasil proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling diperlukan untuk dilaksanakan.
3. Anggaran pada sub kegiatan merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh
4. Anggaran memerlukan adanya dukungan dari Pengguna Anggaran, sehingga setiap PPTK kegiatan mengetahui kewenangan dan kewajibannya.

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja pegawai dalam melakukan suatu kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas ini dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja utama dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2022, untuk melihat rencana program dan kegiatan prioritas di Dinas komunikasi dan informasi Kota Pontianak tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel. 4.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tahun 2022

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2. 16.	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2. 16. 02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Kota Pontianak	93 persen	972.931.478,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 persen	1.184.040.140,00
2. 16. 02. 2. 01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat	Kota Pontianak	13 informasi	972.931.478,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 informasi	1.184.040.140,00
2. 16. 02. 2. 01. 02.	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah Laporan Monitoring Opini dan Aspirasi	Kota Pontianak	12 dokumen	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat	12 dokumen	197.652.000,00
2. 16. 02. 2. 01. 04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	Kota Pontianak	13 konten	423.283.292,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 konten	358.699.640,00
2. 16. 02. 2. 01. 05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi	Kota Pontianak	4 kali	98.436.403,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 kali	130.500.000,00
2. 16. 02. 2. 01. 06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	Kota Pontianak	504 pengaduan	109.622.256,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		556 pengaduan	126.327.000,00
2. 16. 02. 2. 01. 07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah siaran pers yang dilakukan	Kota Pontianak	21 kali	106.681.085,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena peran HUMAS melekat pada kegiatan ini dan membutuhkan biaya untuk kerjasama dengan media	23 kali	135.300.500,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 02. 2. 01. 08.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	jumlah komunitas masyarakat / mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi kebijakan pemerintah	Kota Pontianak	6 komunitas	120.507.019,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 komunitas	107.036.000,00
2. 16. 02. 2. 01. 09.	Manajemen Komunikasi Krisis	jumlah dokumen laporan pengelolaan komunikasi krisis Kota Pontianak	Kota Pontianak	3 dokumen	28.281.199,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 dokumen	43.680.000,00
2. 16. 02. 2. 01. 11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah informasi dan dokumentasi yang disampaikan melalui media PPID	Kota Pontianak	45 informasi	76.120.224,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		45 informasi	84.845.000,00
2. 16. 03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	Kota Pontianak	94 persen	3.239.440.019,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 persen	2.517.395.700,00
2. 16. 03. 2. 01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Kota Pontianak	29 domain / sub domain	1.001.547.269,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175 domain / sub domain	313.858.000,00
2. 16. 03. 2. 01. 02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	Kota Pontianak	29 domain / sub domain	116.578.791,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		175 domain / sub domain	133.482.000,00
2. 16. 03. 2. 01. 03.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang sudah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	5 perangkat daerah	884.968.478,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Masih membutuhkan alokasi dana yang besar karena jaringan intra pemerintah belum sepenuhnya tersedia	30 perangkat daerah	180.376.000,00
2. 16. 03. 2. 02.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	Kota Pontianak	2 Aplikasi / Layanan Publik	2.237.892.750,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Aplikasi / Layanan Publik	2.203.537.700,00
2. 16. 03. 2. 02. 02.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan e-government	Kota Pontianak	0 kali	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 kali	61.870.526,00
2. 16. 03. 2. 02. 03.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Kota Pontianak	30 perangkat daerah	1.510.144.925,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 perangkat daerah	1.347.058.674,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 03. 2. 02. 07.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi/Sistem elektronik yang dikembangkan dan sesuai dengan peraturan	Kota Pontianak	3 aplikasi	190.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 aplikasi	203.612.000,00
2. 16. 03. 2. 02. 08.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Aplikasi / Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Pontianak	1 aplikasi	66.086.208,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 aplikasi	70.909.000,00
2. 16. 03. 2. 02. 09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Program Kegiatan terkait pelaksanaan Smart City	Kota Pontianak	25 perangkat daerah	381.301.617,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 perangkat daerah	420.437.000,00
2. 16. 03. 2. 02. 10.	Pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra Pemerintah	Kota Pontianak	5 sistem	5.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 sistem	11.445.000,00
2. 16. 03. 2. 02. 12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi SPBE	Kota Pontianak	1 laporan	85.360.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 laporan	88.205.500,00
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2. 20.	BIDANG URUSAN STATISTIK SEKTORAL								
2. 20. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	Kota Pontianak	92 persen	759.708.964,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		98 persen	571.717.200,00
2. 20. 02. 2. 01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kota Pontianak yang terbaru/terupdate	Kota Pontianak	1650 data	759.708.964,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2000 data	571.717.200,00
2. 20. 02. 2. 01. 01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan pelaksanaan Forum Data Kota Pontianak	Kota Pontianak	4 Kali	130.772.845,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 Kali	120.902.800,00
2. 20. 02. 2. 01. 02.	Peningkatan Kapasitas SDM PEMDA dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah bimtek, sosialisasi dan pendampingan pengumpulan data statistik sektoral yang diselenggarakan	Kota Pontianak	2 kali	30.808.936,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		8 kali	49.813.000,00
2. 20. 02. 2. 01. 03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Buku Metadata kegiatan statistik sektoral dan Buku Metadata Satu Data	Kota Pontianak	100 buku	41.850.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		400 buku	44.501.400,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 20. 02. 2. 01. 04.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Buku Updating Data Statistik Sektoral, Buku Data Dinamis dan Buku Kota Pontianak Dalam Angka	Kota Pontianak	250 buku	71.690.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		850 buku	46.300.000,00
2. 20. 02. 2. 01. 05.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur statistik sektoral yang dikembangkan	Kota Pontianak	0 Unit		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 Unit	-
2. 20. 02. 2. 01. 06.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	1) Jumlah Buku Profil Daerah;	Kota Pontianak	140 buku	484.587.183,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena kegiatan survey harus dilakukan untuk pemenuhan indikator LPPD	645 buku	310.200.000,00
		2) Jumlah Data yang sudah terintegrasi pada portal satu data Kota Pontianak;		1650 data				2000 data	
		3) Jumlah Expose Data Statistik Sektoral		30 kali				125 kali	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2. 21.	BIDANG URUSAN PERSANDIAN								
2. 21. 02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat terseleenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kota Pontianak	Kota Pontianak	Baik Indeks	244.843.098,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Sangat Baik Indeks	229.466.000,00
2. 21. 02. 2. 01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandian	Kota Pontianak	1 area	237.843.098,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 area	218.566.000,00
2. 21. 02. 2. 01. 01.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah	Kota Pontianak	1 dokumen	23.992.128,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dokumen	28.604.000,00
2. 21. 02. 2. 01. 02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah sistem elektronik / sistem informasi yang telah diaudit dengan resiko rendah	Kota Pontianak	8 sistem	64.310.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		32 sistem	76.670.000,00
2. 21. 02. 2. 01. 03.	Pelaksanaan Kemanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah aplikasi / sistem elektronik / kegiatan strategis non elektronik / titik komunikasi yang diamankan melalui pengamanan sinyal dan menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berdasarkan PHKS	Kota Pontianak	6 sistem / kegiatan	90.116.570,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membutuhkan alokasi dana tambahan karena kurang tersedianya perangkat yang mendukung pelaksanaan kegiatan	24 sistem / kegiatan	100.757.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 21. 02. 2. 01. 04.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sertifikat elektronik yang diterbitkan untuk pengamanan informasi daerah	Kota Pontianak	7 Sertifikat elektronik	59.424.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		28 Sertifikat elektronik	12.535.000,00
2. 21. 02. 2. 02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	Kota Pontianak	5 Perangkat Daerah	7.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Perangkat Daerah	10.900.000,00
2. 21. 02. 2. 02. 01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jangka waktu Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	12 bulan	7.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	10.900.000,00
2. 16. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Kota Pontianak	94 persen	5.349.546.241,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 persen	7.178.272.361,00
2. 16. 01. 2. 01.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak	22 dokumen	31.257.091,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 dokumen	27.659.074,00
2. 16. 01. 2. 01. 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Pontianak	7 Dokumen	8.099.010,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Dokumen	3.687.600,00
2. 16. 01. 2. 01. 02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan pada dokumen RKA SKPD yang disusun	Kota Pontianak	60 Sub Kegiatan	2.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		60 Sub Kegiatan	3.687.600,00
2. 16. 01. 2. 01. 03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah sub kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	Kota Pontianak	20 Sub Kegiatan	4.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20 Sub Kegiatan	3.687.600,00
2. 16. 01. 2. 01. 04.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah kegiatan pada dokumen DPA SKPD yang disusun	Kota Pontianak	13 Kegiatan	2.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 Kegiatan	3.687.600,00
2. 16. 01. 2. 01. 05.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan yang berubah pada dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	Kota Pontianak	9 Kegiatan	2.300.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		9 Kegiatan	3.687.600,00
2. 16. 01. 2. 01. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Kota Pontianak	5 Laporan	5.928.230,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 Laporan	4.037.074,00
2. 16. 01. 2. 01. 07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pontianak	6 Laporan	5.529.851,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Laporan	5.184.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 01. 2. 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pontianak	12 bulan	4.479.723.518,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	5.900.667.033,00
2. 16. 01. 2. 02. 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Kota Pontianak	12 bulan	4.130.200.000,00	Dana Transfer (DAU)		12 bulan	5.634.471.865,00
2. 16. 01. 2. 02. 02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jangka waktu penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kota Pontianak	12 bulan	18.736.650,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	19.303.400,00
2. 16. 01. 2. 02. 03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kota Pontianak	12 bulan	316.620.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	229.702.000,00
2. 16. 01. 2. 02. 04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jangka waktu Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak	1 bulan	3.180.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	2.335.000,00
2. 16. 01. 2. 02. 05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	12 laporan	1.098.967,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 laporan	3.546.768,00
2. 16. 01. 2. 02. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kota Pontianak	12 laporan	9.887.901,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 laporan	11.308.000,00
2. 16. 01. 2. 05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	83 bulan	80.680.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	128.853.260,00
2. 16. 01. 2. 05. 02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Pontianak	4 stel	50.680.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		83 stel	78.713.260,00
2. 16. 01. 2. 05. 03.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	Kota Pontianak	3 orang	20.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 orang	33.790.000,00
2. 16. 01. 2. 05. 04.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Pontianak	12 kali	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 kali	16.350.000,00
2. 16. 01. 2. 06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pontianak	12 bulan	210.792.882,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	328.197.190,00
2. 16. 01. 2. 06. 01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	12 bulan	10.137.061,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	11.510.000,00
2. 16. 01. 2. 06. 02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pontianak	1 Unit	1.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 Unit	1.250.000,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 01. 2. 06. 03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Pontianak	1 Unit	1.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		0 Unit	1.500.000,00
2. 16. 01. 2. 06. 04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	Kota Pontianak	12 bulan	128.205.821,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	197.819.272,00
2. 16. 01. 2. 06. 05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kota Pontianak	12 bulan	35.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	61.040.000,00
2. 16. 01. 2. 06. 06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Pontianak	12 bulan	10.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	11.673.900,00
2. 16. 01. 2. 06. 07.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kota Pontianak	12 bulan	25.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	43.404.018,00
2. 16. 01. 2. 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	75 unit	141.914.750,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		167 unit	205.660.000,00
2. 16. 01. 2. 07. 04.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kota Pontianak	0 unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	-
2. 16. 01. 2. 07. 05.	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	Kota Pontianak	10 unit	20.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		64 unit	80.660.000,00
2. 16. 01. 2. 07. 06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kota Pontianak	10 unit	100.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		77 unit	50.000.000,00
2. 16. 01. 2. 07. 07.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit pengadaan aset tetap tak berwujud	Kota Pontianak	1 unit	21.914.750,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		5 unit	75.000.000,00
2. 16. 01. 2. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pontianak	12 bulan	308.396.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	348.802.122,00
2. 16. 01. 2. 08. 01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pontianak	12 bulan	10.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	14.306.250,00
2. 16. 01. 2. 08. 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	Kota Pontianak	12 bulan	36.207.600,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	64.329.598,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. 16. 01. 2. 08. 03.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kota Pontianak	12 bulan	262.188.400,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 bulan	270.166.274,00
2. 16. 01. 2. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kota Pontianak	69 Unit	96.782.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		304 Unit	238.433.682,00
2. 16. 01. 2. 09. 02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Kota Pontianak	2 unit	39.532.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 unit	45.244.374,00
2. 16. 01. 2. 09. 03.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Pontianak	66 unit	52.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		289 unit	52.000.000,00
2. 16. 01. 2. 09. 04.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Pontianak	1 unit	5.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 unit	141.189.308,00

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, sebagai dokumen perencanaan yang berisikan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu tahun anggaran 2022, dengan demikian Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak tahun 2022 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan RKT dan KUA PPAS demi lancarnya pelaksanaan program yang akan ditetapkan dalam KUA PPAS, RKPD Kota Pontianak Tahun 2022 yang telah sesuai dengan potensi yang tersedia, dengan tujuan antara lain :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak untuk mengakomodir Visi, Misi, Program dan Sasaran Walikota Pontianak yang telah ditetapkan yang disinergikan dengan Visi dan Misi Organisasi.
2. Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022.

Penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra-Perangkat Daerah) adalah Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang harus mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan untuk dapat melihat konsistensi antara Renstra-Perangkat Daerah dan Renja, RKT Perangkat Daerah, maka dokumen Renja, RKT Perangkat Daerah haruslah mempunyai keterkaitan pokok-pokok isi dari Renstra- Perangkat Daerah tersebut seperti isu-isu strategis, Visi, Misi, strategi dan kebijakan, maupun tujuan dan sasarannya sedangkan

program Perangkat Daerah haruslah berpedoman pada rumusan program RPJMD. Kegiatan yang direncanakan pada Renja dan RKT Perangkat Daerah harus juga berpedoman pada indikasi kegiatan Renstra - Perangkat Daerah dan mempunyai keselarasan rumusan substansi yang ditekankan pada RKPD.

Adapun manfaat Renja dalam pengelolaan organisasi Perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yaitu :

1. Untuk pengelolaan keberhasilan, dimana perencanaan strategik akan menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2022.
3. Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

LAMPIRAN



RENCANA KERJA (RENJA)

2022